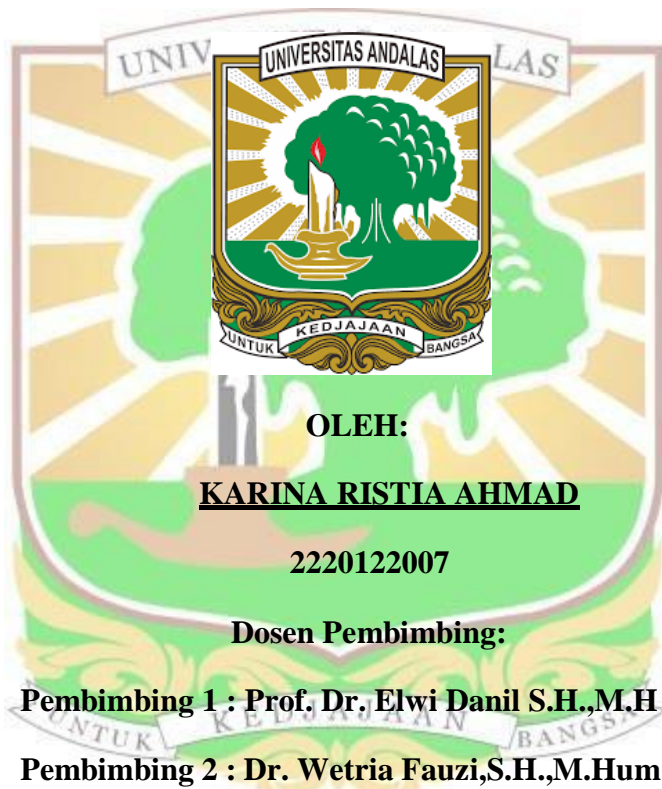


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP ADANYA
KETERANGAN PALSU DARI PARA PENGHADAP DALAM AKTA
YANG DIBUATNYA**

TESIS

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Magister Kenotariatan*



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP ADANYA KETERANGAN PALSU DARI PARA PENGHADAP DALAM AKTA YANG DIBUATNYA

(Karina Ristia Ahmad, 2220122007, Magister Kenotariatan Unand , 2022, 123 Halaman, 2024)

Notaris ditugaskan sebagai pejabat umum yang membuat akta di mana akta yang dikeluarkan oleh notaris adalah bukti sempurna, terkuat, dan terpenuh yang dapat menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, seorang notaris harus melaksanakan posisinya sesuai dengan kewenangannya sebagai pejabat umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan sumber data yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi pustaka. Penelitian yang telah dilakukan menemukan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh UUJN diatur secara khusus pada Pasal 66 ayat (1) huruf b UUJN menyatakan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Dalam pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum, ataupun hakim untuk pemeriksaan suatu perkara perdata harus melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris selaku lembaga perlindungan hukum bagi Notaris.yaitu . Akibat hukum untuk akta Notaris yang berisi pernyataan palsu dari para penghadap adalah bahwa pihak yang merasa dirugikan dengan keberadaan akta dapat mengajukan gugatan di pengadilan negeri sehingga hakim dapat memutuskan untuk membatalkan akta tersebut. Dengan demikian, akta tidak lagi memiliki kekuatan hukum karena telah dinyatakan cacat secara hukum dan batal demi hukum karna tidak memenuhi syarat objektif. Bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan pada penghadap yang memberikan pernyataan palsu atas akta otentik kepada notaris adalah bahwa penghadap akan diancam hukuman sesuai dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP, Hakim menjatuhkan hukuman pidana yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, karena mempertimbangkan hal-hal yang meringankan para terdakwa, yaitu terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa tidak pernah dihukum sedangkan hal-hal yang memberatkan para terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Kata kunci : Akibat Hukum, Akta Notaris, Keterangan Palsu, Perlindungan Hukum, Penghadap.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR THE NOTARY AGAINST FALSE STATEMENTS FROM THE APPLICANTS IN THE DEEDS THAT THEY MAKES

*(Karina Ristia Ahmad, 2220122007, Notary Master's Study Program,
2022, 123 Pages, 2024)*

Notaries serve as public officials responsible for creating legal documents, which are considered strong evidence that ensures legal certainty. It is essential for notaries to perform their duties according to their authority, as outlined in the law. This thesis employs a normative legal approach, utilizing primary, secondary, and tertiary legal sources gathered through literature studies. The research reveals that the legal protection provided by the Notary Public Law (UUJN) is specifically detailed in Article 66, paragraph (1), letter b. This article states that investigators, public prosecutors, or judges can, with the approval of the Notary Honorary Council, take photocopies of the deed minutes and related documents stored by the notary. They may also summon the notary for examination related to these documents. When a notary is summoned for a civil case, this must also be approved by the Notary Honorary Council, which acts as a legal protection body for notaries. If a deed contains false statements, the aggrieved party can file a lawsuit in district court to have the deed canceled. If successful, the deed will be deemed legally defective and null, as it fails to meet essential requirements. Furthermore, if a party provides false information in an authentic deed, they may face criminal penalties under Article 266, paragraph (1) of the Criminal Code. A judge may impose a prison sentence of up to two years and six months, considering mitigating factors such as the defendant's remorse and lack of prior convictions, while also weighing aggravating factors like the potential harm caused to others.

Keywords: *Legal Consequences, Notarial Deeds, False Statements, Legal Protection, Appearance.*